

Daftar Pustaka

Buku

- Awang, Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Beratha, I Nyoman, 1982, *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 2007, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, Jakarta.
- Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, PKHKD FH UNSOED dan Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Gie, The Liang, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia Jilid 1 Edisi Kedua (Diperlengkap)*, Liberty, Yogyakarta.
- H.R., Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hartono, M. Dimyati, 2009, *Problematisasi Dan Solusi Amendemen Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Jamin, Mohammad, 2004, *Hukum Adat Dan Sistem Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Kusdarini, Eny, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Universitas Negeri Yogyakarta Press, Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud M.D., 2009, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munir, Surojul, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia Konsep, Azas, Dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1984, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Situmorang, Victor, 1987, *Intisari Ilmu Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soehino, 1988, *Perkembangan Pemerintahan Daerah*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Solekhan, Moch, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- Sujadi, Firman, Achmad Dian, Beni S. Ambarjaya, Diah Rahmatia, 2014, *"Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Jilid 1: Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa"*, Bee Media Pustaka, Jakarta.

Sukriono, Didik, 2013, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah, Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Malang.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a, 2010, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung.

Tjandra, W. Riawan, 2013, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, ICCE Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah diumumkan pada tanggal 23 November 1946.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1946 tentang Pemghapusan Desa-Desa Perdikan diumumkan pada tanggal 4 September 1946.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah diumumkan pada tanggal 10 Juli 1948.

Undang-Undang Republik Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 56.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954 Tentang Mengubah

Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) Dan *Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 Nomor 419)* Sebagai Undang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 850.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5593.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4155.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558.

Kamus:

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Moeimam, Susi dan Hein Steinhauer, 2014, *Kamus Belanda-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.